

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat periode 2020-2024, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum mampu mendorong peningkatan Belanja Daerah secara signifikan pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Dana Transfer berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Transfer masih menjadi sumber utama pembiayaan Belanja Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Terjadi *Flypaper Effect* pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini ditunjukkan oleh pengaruh Dana Transfer terhadap Belanja Daerah yang lebih besar dibandingkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga belanja daerah lebih responsif terhadap Dana Transfer daripada PAD.
- 4) Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, peningkatan Belanja Daerah berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diproksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

- 5) Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD belum secara langsung mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Dana Transfer tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan Dana Transfer belum secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 7) Belanja Daerah tidak mampu memediasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Dengan demikian, pengaruh PAD terhadap kesejahteraan masyarakat tidak terjadi melalui Belanja Daerah.
- 8) Belanja Daerah mampu memediasi secara penuh (*full mediation*) pengaruh Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Transfer memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui Belanja Daerah sebagai mekanisme penyaluran kebijakan fiskal.

5.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkuat teori desentralisasi fiskal dan teori keuangan publik. Temuan bahwa *Flypaper Effect* masih terjadi pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan bahwa belanja daerah lebih responsif terhadap Dana Transfer dibandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah. Selain itu, hasil penelitian menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan

masyarakat lebih ditentukan oleh efektivitas alokasi Belanja Daerah daripada besarnya pendapatan daerah itu sendiri. Dengan demikian, Belanja Daerah menjadi mekanisme utama dalam mentransformasikan kapasitas fiskal menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dari sisi praktis, hasil penelitian memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk tidak hanya meningkatkan penerimaan PAD, tetapi juga meningkatkan kualitas pengelolaan Belanja Daerah agar lebih produktif dan berorientasi pada pembangunan manusia, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, pemerintah pusat perlu terus menyempurnakan kebijakan transfer ke daerah agar tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemerataan fiskal, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan skema transfer berbasis kinerja (*performance-based transfer*).

Secara akademis, penelitian ini memperkaya literatur mengenai ***Flypaper Effect*** dengan mengintegrasikan Belanja Daerah sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara PAD, Dana Transfer, dan Kesejahteraan Masyarakat. Temuan bahwa Belanja Daerah memediasi secara penuh pengaruh Dana Transfer terhadap Kesejahteraan Masyarakat, tetapi tidak memediasi pengaruh PAD, memberikan perspektif baru bahwa pengaruh kapasitas fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat tidak selalu berlangsung secara langsung, melainkan dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan Belanja Daerah. Oleh karena itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian di bidang desentralisasi fiskal, keuangan publik, dan pembangunan daerah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dan pengembangan penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penelitian ini mengukur kesejahteraan masyarakat hanya menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Meskipun IPM merupakan indikator yang komprehensif karena mencakup dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, indikator tersebut belum sepenuhnya merepresentasikan kesejahteraan masyarakat secara multidimensi, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, ketimpangan pendapatan, maupun prevalensi stunting.
- 2) Penelitian ini hanya menggunakan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer, Belanja Daerah, Jumlah Penduduk, dan PDRB per kapita sebagai variabel penelitian. Faktor-faktor lain yang juga berpotensi memengaruhi kesejahteraan masyarakat, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, efektivitas belanja daerah, kualitas tata kelola pemerintahan, maupun tingkat kemandirian fiskal daerah, belum dimasukkan ke dalam model penelitian.
- 3) Penelitian ini terbatas pada 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2020-2024. Oleh karena itu, hasil penelitian menggambarkan karakteristik fiskal daerah pada wilayah dan periode tersebut sehingga generalisasi hasil penelitian ke daerah lain dengan

karakteristik ekonomi dan kapasitas fiskal yang berbeda perlu dilakukan secara hati-hati.

5.4 Arah Riset Masa Depan

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan model penelitian dengan menambahkan variabel yang mencerminkan kapasitas fiskal dan karakteristik daerah, seperti SiLPA, tingkat kemandirian fiskal, derajat desentralisasi fiskal, rasio efektivitas PAD, ukuran pemerintah daerah, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran, kualitas tata kelola pemerintahan, serta efektivitas belanja daerah. Penambahan variabel tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perilaku fiskal pemerintah daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pengukuran kesejahteraan masyarakat tidak hanya dapat menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi juga dikombinasikan dengan indikator lain, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio Gini, pengeluaran riil per kapita, maupun indikator *Sustainable Development Goals* (SDGs), sehingga dampak kebijakan fiskal daerah terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dianalisis secara lebih multidimensional.

Dari sisi cakupan penelitian, penelitian mendatang dapat memperluas wilayah pengamatan ke seluruh provinsi di Indonesia atau melakukan studi komparatif antardaerah berdasarkan tingkat kapasitas fiskal, karakteristik ekonomi, maupun tingkat kemandirian fiskal. Perluasan periode observasi juga diperlukan untuk mengevaluasi dinamika pengelolaan keuangan daerah setelah implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).

Dari aspek metodologi, penelitian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan ekonometrika yang lebih mampu mengatasi potensi endogenitas, seperti *Dynamic Panel Model* dengan *Generalized Method of Moments* (GMM), serta menerapkan pendekatan mediasi berbasis *bootstrapping* untuk memperoleh estimasi pengaruh tidak langsung yang lebih robust. Penelitian mendatang juga diharapkan tidak hanya mengidentifikasi keberadaan *Flypaper Effect*, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi munculnya fenomena tersebut serta implikasinya terhadap kemandirian fiskal, efektivitas belanja daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penelitian lanjutan diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang lebih kuat bagi pengembangan teori desentralisasi fiskal, teori keuangan publik, serta perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.

